

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 5 Nomor 1, April 2024

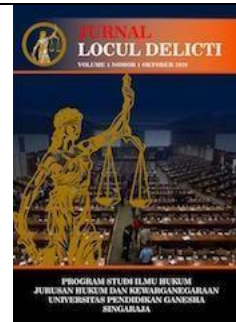
p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



PARIWISATA BALI MELEJIT, KEAMANAN DIPERTARUHKAN: FENOMENA 'BULE KERE' DAN ANCAMAN KEKERASAN DI PULAU DEWATA

Gusti Agung Dananjaya Mandala¹

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : agung.dananjaya@student.undiksha.ac.id

Info Artikel	Abstract
Masuk: 13 Januari 2024 Diterima: 14 Maret 2024 Terbit: 1 April 2024 Keywords: Broke Foreigner, Tourism, Tourists, Violence	<i>The phenomenon of 'bule kere' in Bali foreign tourists with limited budgets who often violate laws and social norms has become a serious challenge to the security and reputation of the island's tourism sector. This study employs a qualitative method with a literature review of sources from the past ten years to examine how 'bule kere' contributes to rising violence, social problems, and impacts Bali's tourism industry. The findings reveal that unethical behavior and criminal acts by foreign tourists create public unrest, reduce trust among quality tourists, and highlight the need for strict law enforcement, both nationally and through customary law. Collaboration between government, law enforcement, tourism industry stakeholders, and local communities is essential to develop comprehensive solutions that safeguard Bali's security and cultural heritage amid rapid global tourism flows</i>
Kata kunci:	Abstrak
Bule Kere, Pariwisata, Wisatawan, Kekerasan	Fenomena 'bule kere' di Bali, yakni wisatawan asing berbudget rendah yang sering melakukan pelanggaran hukum dan norma sosial, telah menjadi tantangan serius bagi keamanan dan citra pariwisata

	Pulau Dewata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dari sumber sepuluh tahun terakhir untuk mengkaji kontribusi 'bule kere' terhadap meningkatnya kasus kekerasan, masalah sosial, serta dampaknya terhadap industri pariwisata Bali. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku tidak etis dan kriminalitas yang dilakukan wisatawan asing menimbulkan keresahan masyarakat, menurunkan kepercayaan wisatawan berkualitas, dan memicu kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas, baik secara nasional maupun melalui hukum adat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal untuk menciptakan solusi komprehensif demi menjaga keamanan dan kelestarian budaya Bali di tengah pesatnya arus pariwisata global.
Corresponding Author: Gusti Agung Dananjaya Mandala E-mail: agung.dananjaya@student.tundiksha.ac.id	
@Copyright 2024	

Pendahuluan

Pulau Bali, yang dikenal sebagai surga wisata dunia, kembali mencatat lonjakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pasca-pandemi. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan, pada April 2025 saja, tercatat 591.221 kunjungan wisatawan asing. Keberhasilan ini membawa dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku industri pariwisata. Namun, di balik geliat pariwisata yang kian melejit, muncul fenomena 'bule kere' istilah populer untuk wisatawan asing yang datang dengan dana terbatas, bahkan kerap mengandalkan cara-cara tidak etis untuk bertahan hidup di Bali, seperti menolak membayar jasa dan fasilitas, hingga melakukan pelanggaran hukum.

Fenomena 'bule kere' bukan sekadar soal wisatawan berbudget rendah, melainkan telah berkembang menjadi masalah sosial yang kompleks. Banyak dari mereka yang tidak hanya mengandalkan wisata murah, tetapi juga sering terlibat

dalam tindakan yang meresahkan, mulai dari penipuan, pelanggaran aturan adat, hingga tindak kekerasan dan kriminalitas. Kasus-kasus seperti wisatawan asing yang menolak membayar layanan spa dan restoran, mengamuk saat ditegur, hingga melakukan tindak kriminal berat seperti pemerkosaan dan perusakan properti, semakin sering terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Bali.

Dampak buruk dari fenomena ini mulai terasa pada citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Masyarakat lokal mengeluhkan perilaku para 'bule kere' yang dinilai merusak nama baik Pulau Dewata, menurunkan minat wisatawan berkualitas, dan bahkan mengancam nilai-nilai adat serta keamanan sosial. Tidak sedikit warga Bali yang merasa resah dan menuntut penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran dari kalangan wisatawan asing.

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana fenomena 'bule kere' berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan dan masalah sosial di Bali serta dampaknya pada citra industri pariwisata?
2. Bagaimana kinerja dan peran imigrasi serta penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan yang timbul dari wisatawan di Bali?
3. Bagaimana ketegasan sanksi hukum nasional, hukum adat, dan kebijakan pemerintah bagi warga negara asing pelaku kekerasan di Bali?

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif fenomena 'bule kere' di Bali, menelaah kontribusinya terhadap masalah sosial dan kriminalitas, serta mencari solusi efektif untuk mengatasi dampak negatifnya terhadap industri pariwisata dan masyarakat Bali.

Bali telah lama menjadi magnet wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Namun, pertumbuhan pariwisata berbasis mass tourism yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas wisatawan, dinilai turut memicu masuknya wisatawan berbudget rendah atau 'backpacker' yang tidak selalu menghormati aturan lokal. Pengamat pariwisata menilai, strategi pemasaran Bali yang terlalu menekankan jumlah kunjungan tanpa seleksi kualitas wisatawan, membuka ruang bagi masuknya wisatawan yang tidak siap secara finansial dan cenderung mencari cara bertahan

hidup yang tidak etis, bahkan melanggar hukum.

Kasus 'bule kere' yang menolak membayar jasa spa, makan gratis di restoran, hingga mengamuk saat ditegur, menjadi contoh nyata bagaimana perilaku wisatawan asing dapat menimbulkan keresahan sosial dan menambah beban aparat penegak hukum serta masyarakat lokal. Tidak jarang, perilaku semacam ini berujung pada tindakan kriminal, mulai dari pencurian, penipuan, hingga kekerasan fisik dan seksual. Sering juga ditemukan kasus-kasus wisatawan asing yang tidak hanya memiliki daya beli yang rendah, namun juga memiliki masalah emosional yang mampu menimbulkan masalah sosial yang akan berdampak pada pariwisata pulau Bali kedepannya.

Artikel ini bertujuan mengkaji fenomena 'bule kere' secara komprehensif, menelaah kontribusinya terhadap meningkatnya kasus kekerasan dan masalah sosial di Bali, serta dampaknya terhadap citra industri pariwisata. Selain itu, artikel ini juga akan membahas peran dan kinerja aparat imigrasi serta penegak hukum, serta menilai ketegasan sanksi hukum nasional, hukum adat, dan kebijakan pemerintah dalam menangani pelanggaran oleh warga negara asing.

Artikel ini diharapkan, kajian ini dapat memberikan rekomendasi solusi yang efektif untuk mengatasi dampak negatif fenomena 'bule kere', memperkuat sinergi antara penegakan hukum nasional dan adat, serta menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, pariwisata Bali dapat terus tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan keamanan dan kehormatan masyarakat lokal.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih karena sangat relevan dan efektif untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional seperti 'bule kere' serta dampaknya terhadap keamanan dan pariwisata di Bali.

Metode kualitatif memungkinkan penulis untuk memahami secara mendalam konteks sosial, budaya, dan perilaku yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji,

dan menganalisis berbagai sumber tertulis dari kurun waktu 10 tahun terakhir, seperti artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah, berita media, dan kajian akademis yang membahas pariwisata Bali, wisatawan asing berbudget rendah, serta isu keamanan dan sosial di Pulau Dewata.

Pemilihan metode ini didasari oleh beberapa alasan utama. Pertama, fenomena 'bule kere' tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi atau kriminalitas, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika sosial dan budaya lokal Bali. Dengan metode kualitatif dan studi literatur, peneliti dapat menggali perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai perkembangan fenomena ini, respons masyarakat Bali, serta implikasinya terhadap citra pariwisata.

Kedua, pendekatan ini memungkinkan analisis data sekunder yang komprehensif tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memerlukan waktu dan biaya besar. Hal ini sangat efektif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan sebab-akibat dalam fenomena sosial yang sedang diteliti. Ketiga, mengingat isu kekerasan dan pelanggaran oleh wisatawan asing bersifat sensitif dan sulit diakses secara langsung, studi literatur menjadi alternatif yang aman dan objektif untuk memperoleh gambaran menyeluruh melalui dokumen resmi dan hasil penelitian terdahulu.

Keempat, metode ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji fenomena 'bule kere', kontribusinya terhadap kekerasan dan masalah sosial, serta peran aparat hukum dan kebijakan pemerintah. Studi literatur memungkinkan integrasi berbagai perspektif hukum, sosial, dan kebijakan yang telah dipublikasikan, sehingga menghasilkan analisis yang holistik dan informatif.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, artikel berita, dan sumber akademis lain yang relevan dalam rentang waktu 2015-2025. Selanjutnya, data diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kekinian informasi, kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama seperti fenomena 'bule kere', dampak sosial dan keamanan, kinerja aparat hukum, serta kebijakan pemerintah.

Analisis dilakukan secara deskriptif- kritis dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul, membandingkan temuan antar sumber, dan mengaitkan hasil

kajian dengan teori serta konsep yang relevan dalam studi pariwisata dan keamanan sosial. Akhirnya, hasil analisis disintesis dan disajikan dalam narasi yang sistematis dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung tujuan penelitian. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai fenomena 'bule kere' serta ancaman kekerasan di Bali, sekaligus mengidentifikasi langkah strategis yang efektif untuk menjaga keamanan dan citra pariwisata Pulau Dewata.

Pembahasan

Fenomena "Bule Kere" dan Kontribusinya Terhadap Kasus Kekerasan dan Masalah Sosial di Bali

Fenomena 'bule kere' mengacu pada wisatawan asing yang datang ke Bali dengan dana terbatas dan kerap melakukan perilaku yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pariwisata Bali kembali melejit pasca-pandemi, kasus pelanggaran dan tindak kriminal yang dilakukan oleh wisatawan asing meningkat signifikan. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) di Bali meliputi pencurian, penipuan, kekerasan fisik, hingga pelanggaran visa seperti overstay dan bekerja tanpa izin.

Menurut Arya Dega (2025), "Fenomena 'bule kere' bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang mengancam keamanan dan keharmonisan masyarakat Bali." Kasus-kasus yang melibatkan 'bule kere' sering kali bermotif untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak etis, termasuk menolak membayar jasa, melakukan pencurian kecil-kecilan, atau bahkan melakukan kekerasan. Fenomena ini menimbulkan keresahan di masyarakat Bali yang sangat menjunjung tinggi adat dan norma sosial. Perilaku tidak sopan dan merusak ini tidak hanya merugikan ekonomi pelaku usaha pariwisata, tetapi juga mengancam keharmonisan sosial dan keamanan publik. Dampak sosialnya sangat nyata. Masyarakat lokal merasa terganggu dan tidak aman dengan kehadiran wisatawan asing yang berperilaku buruk. Ketegangan sosial mulai muncul, terutama

di kawasan- kawasan wisata utama seperti Kuta, Seminyak, dan Ubud, yang selama ini menjadi pusat aktivitas pariwisata. Selain itu, perilaku ‘bule kere’ yang mengabaikan aturan adat dan budaya Bali, seperti memasuki pura tanpa izin atau merusak fasilitas keagamaan, menimbulkan konflik budaya dan sosial yang memperburuk hubungan antara wisatawan dan masyarakat lokal. Data menunjukkan, dalam kurun Januari-Juni 2023 saja, sebanyak 158 warga negara asing telah dideportasi dari Bali akibat berbagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran keimigrasian hingga tindak kriminal berat seperti pemerkosaan dan merusak properti. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga mencoreng citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan ramah.

Masyarakat Bali, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, merasa perilaku para ‘bule kere’ semakin mengancam keharmonisan sosial. Tindakan-tindakan seperti masuk ke area suci tanpa izin, berpakaian tidak sopan, hingga melakukan aksi kekerasan, dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap adat dan budaya Bali yang sakral. Tidak mengherankan jika keresahan masyarakat semakin meningkat dan menuntut adanya penanganan yang lebih tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dampak Fenomena “Bule Kere” Terhadap Citra Industri Pariwisata Bali

Bali selama ini dikenal sebagai destinasi wisata yang aman, ramah, dan kaya budaya. Namun, maraknya kasus pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh wisatawan asing, khususnya ‘bule kere’, mulai mencoreng citra tersebut. Kejadian-kejadian seperti pencurian, perampokan bersenjata, maupun kekerasan seksual yang menimpa wisatawan asing maupun warga lokal, menimbulkan kekhawatiran yang meluas.

Banbsite.com (2025) melaporkan bahwa “Kasus kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing di Bali berpotensi menurunkan kepercayaan wisatawan dan merusak reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kelas dunia.” Dampak langsung dari fenomena ini adalah penurunan kepercayaan wisatawan, khususnya wisatawan berkualitas yang mencari pengalaman wisata yang aman dan berbudaya. Penurunan ini berpotensi menimbulkan efek domino

berupa berkurangnya kunjungan wisatawan asing, yang pada akhirnya merugikan sektor pariwisata dan ekonomi lokal yang sangat bergantung pada industri ini. Citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia sangat bergantung pada keamanan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap budaya lokal. Maraknya kasus pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh wisatawan asing, khususnya 'bule kere', berpotensi menurunkan daya tarik Bali di mata wisatawan berkualitas. Wisatawan yang menghargai aturan dan budaya lokal bisa merasa tidak nyaman dan memilih destinasi lain yang dinilai lebih aman dan tertib.

Selain itu, ketegangan sosial yang muncul akibat perilaku 'bule kere' juga dapat menimbulkan stigma negatif terhadap seluruh wisatawan asing. Hal ini dapat memperburuk hubungan sosial dan menimbulkan konflik antara warga lokal dan wisatawan, yang pada akhirnya mengganggu suasana kondusif yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. pengawasan berlebihan terhadap wisatawan asing, seperti pembentukan berbagai satuan tugas (satgas) khusus, juga dapat menimbulkan efek negatif. Wisatawan yang berperilaku baik bisa merasa risih dan tidak nyaman dengan pengawasan ketat, sehingga berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penciptaan suasana wisata yang tetap ramah dan nyaman bagi wisatawan yang taat aturan.

Kinerja dan Peran Imigrasi Serta Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Oleh Wisatawan Asing

Pemerintah dan aparat penegak hukum di Bali telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh fenomena 'bule kere'. Salah satu langkah strategis adalah pembentukan Satgas Bali Becik, Tim Satgas Tata Kelola Pariwisata, dan Tim Pengawas Orang Asing (Tim Pora) yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing. Selain itu, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 mengatur tata tertib perilaku wisatawan asing, termasuk kewajiban menghormati adat dan budaya Bali serta larangan-larangan tertentu yang jika dilanggar akan dikenai sanksi administratif hingga deportasi.

Tempo.co (2025) menyatakan, “Penegakan hukum terhadap wisatawan asing yang melanggar aturan di Bali semakin diperketat dengan adanya regulasi terbaru yang mengatur tata tertib dan sanksi tegas bagi pelanggar.” Data menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Juni 2023, sebanyak 158 WNA telah dideportasi dari Bali karena pelanggaran hukum, mulai dari pelanggaran keimigrasian hingga tindak kriminal berat seperti pemerkosaan dan perusakan properti. Penegakan hukum ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak pelanggaran, meskipun tantangan dalam hal koordinasi, sumber daya, dan proses hukum masih ada. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menjadi perhatian. Beberapa pihak menilai bahwa pembentukan satgas khusus dapat menimbulkan beban administratif dan ketidaknyamanan bagi wisatawan yang patuh aturan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkesinambungan dari aparat imigrasi dan kepolisian sebagai tugas rutin mereka sangat diperlukan. Peran aktif masyarakat lokal juga sangat penting dalam melaporkan dan mengawasi perilaku wisatawan agar penegakan hukum dapat berjalan optimal.

Ketegasan Sanksi Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaku Kekerasan Warga Negara Asing

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing di Bali didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan hukum pidana nasional. WNA yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa deportasi dan penangkalan, serta sanksi pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum kerap menghadapi kendala seperti proses administrasi yang panjang, tekanan diplomatik, dan keterbatasan sumber daya aparat.

Kompas.id (2023) menegaskan bahwa “Sinergi antara hukum nasional dan hukum adat Bali menjadi kunci untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di Pulau Dewata.” Hukum adat Bali memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Pelanggaran terhadap norma adat dapat dikenai sanksi adat yang bersifat sosial dan kultural, seperti pengucilan atau denda adat. Pemerintah daerah Bali terus berupaya memperkuat sinergi antara penegakan

hukum nasional dan hukum adat agar penanganan kasus pelanggaran oleh wisatawan asing dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal.

Kebijakan pemerintah, seperti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023, menunjukkan keseriusan dalam mengatur perilaku wisatawan asing agar selaras dengan adat dan budaya Bali. Larangan seperti tidak memasuki pura tanpa izin, tidak memanjat pohon suci, dan kewajiban membayar pungutan wisatawan, diikuti dengan sanksi tegas, termasuk penolakan layanan dan deportasi bagi pelanggar. Implementasi kebijakan ini didukung oleh aparat kepolisian dan Satpol PP yang bertugas mengawasi pelaksanaan aturan tersebut.

Fenomena 'bule kere' dan meningkatnya kasus kekerasan oleh wisatawan asing di Bali menuntut solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Selain penegakan hukum yang tegas dan konsisten, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada wisatawan mengenai norma, adat, dan aturan di Bali. Pemerintah dan pelaku industri pariwisata harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi wisatawan yang taat aturan, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Peran masyarakat lokal juga sangat penting dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran agar aparat hukum dapat bertindak cepat dan tepat. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta koordinasi antar lembaga juga harus menjadi prioritas agar penanganan kasus dapat berjalan efisien dan efektif. Lebih jauh, penguatan sinergi antara hukum nasional dan hukum adat perlu terus dilakukan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat administratif dan pidana, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas Bali. Hal ini akan menjaga keharmonisan sosial sekaligus meningkatkan citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.

Tujuan Penelitian dan Harapan Solusi

Artikel ini bertujuan mengkaji fenomena 'bule kere' secara komprehensif, menelaah kontribusinya terhadap meningkatnya kasus kekerasan dan masalah sosial di Bali, serta dampaknya terhadap citra industri pariwisata. Selain itu, artikel

ini juga akan membahas peran dan kinerja aparat imigrasi serta penegak hukum, serta menilai ketegasan sanksi hukum nasional, hukum adat, dan kebijakan pemerintah dalam menangani pelanggaran oleh warga negara asing.

Diharapkan, kajian ini dapat memberikan rekomendasi solusi yang efektif untuk mengatasi dampak negatif fenomena 'bule kere', memperkuat sinergi antara penegakan hukum nasional dan adat, serta menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, pariwisata Bali dapat terus tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan keamanan dan kehormatan masyarakat lokal.

Kesimpulan

Fenomena 'bule kere' di Bali merupakan konsekuensi dari pertumbuhan pariwisata yang tidak diimbangi dengan pengelolaan dan pengawasan yang memadai terhadap perilaku wisatawan asing. Wisatawan asing berbudget rendah yang kerap melakukan pelanggaran hukum, tindakan tidak etis, hingga kekerasan, telah menimbulkan keresahan sosial, menurunkan rasa aman masyarakat, serta mengancam citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Data deportasi WNA yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar isu individu, melainkan telah menjadi tantangan kolektif bagi pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat Bali secara luas.

Penanganan fenomena ini telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pembentukan Satgas Bali Becik, Tim Pora, serta penerbitan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan tata tertib wisatawan asing. Penegakan hukum nasional dan hukum adat berjalan beriringan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas, koordinasi, dan sumber daya. Sanksi administratif seperti deportasi dan penangkalan telah diterapkan, namun perlu didukung oleh sistem pengawasan yang lebih ketat dan edukasi yang berkelanjutan kepada wisatawan

Dengan demikian, fenomena 'bule kere' dan ancaman kekerasan yang menyertainya membutuhkan solusi

komprehensif yang tidak hanya menekankan pada aspek represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta kelestarian nilai-nilai budaya Bali di tengah arus globalisasi pariwisata.

Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan terhadap wisatawan asing, terutama di kawasan yang rawan pelanggaran, dengan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tanpa diskriminasi. Sanksi administratif, pidana, maupun sanksi adat harus diterapkan secara efektif, didukung oleh koordinasi lintas lembaga yang solid agar penanganan kasus berjalan optimal. Selain itu, edukasi dan sosialisasi intensif kepada wisatawan asing mengenai norma, adat, dan hukum yang berlaku di Bali sangat penting untuk mengurangi pelanggaran. Media digital, brosur, serta sosialisasi langsung di bandara dan tempat wisata dapat menjadi sarana efektif, sementara pelaku industri pariwisata juga harus aktif mengingatkan wisatawan akan pentingnya menghormati budaya lokal.

Pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran juga menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah daerah dapat membentuk forum komunikasi antara aparat, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mempercepat deteksi dan penanganan kasus. Penguatan peran desa adat sebagai filter sosial yang efektif juga sangat dianjurkan untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Di sisi lain, pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menekankan kualitas wisatawan, bukan hanya kuantitas, harus menjadi prioritas. Pemerintah dan pelaku industri pariwisata dapat bekerja sama dengan agen perjalanan internasional dan menggunakan digital marketing yang selektif untuk menarik wisatawan berkualitas.

Terakhir, kebijakan seperti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah juga harus menyiapkan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi korban pelanggaran, baik wisatawan maupun warga lokal, sehingga hak-hak mereka tetap

terlindungi. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara terpadu, Bali dapat menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelestarian budaya, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata unggulan dunia.

Daftar Pustaka

- Astawa, I. N., Sudibia, I. K., & Suryawardani, I. G. A. O. (2019). Sustainable tourism development in Bali: Challenges and opportunities. *Journal of Sustainable Tourism Studies*, 4(1), 20-35.
- Banisite.com. (2025, Januari 5). Kekerasan Terhadap Turis Asing di Bali: Kasus Pemerkosaan yang Mengguncang,
- Dega, A. (2025). Kejahatan WNA di Bali ada motif apa? *Jurnal Kriminologi Bali*, 10(2), 45-60.
- Kompas.id. (2023, August 18). Bersama menjaga Bali tetap aman dan nyaman untuk bersama.
- Mandala, G. A. D. (2025). Pariwisata Bali melejit, keamanan dipertaruhkan: Fenomena 'bule kere' dan ancaman kekerasan di Pulau Dewata. *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan*, 12(1), 75-98.
- Suryawan, I. W. (2018). Peran desa adat dalam menjaga ketertiban sosial di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 112-123.
- Tempo.co. (2025, April 14). 11 poin Surat Edaran Gubernur Bali untuk turis asing.